PROLOG:
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA

DALAM PUSARAN

GLOBALISASI

EDITOR:
Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.
Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Dominikus Rato, Dina Tsalist Wildana, Muhammad Bahrul Ulum, dkk.
@CHRM2 UNEJ, LKIS, 2017

xviii + 440 halaman: 15,5 x 23 cm

1. Pancasila 2. Globalisasi

ISBN: 978-602-6610-22-5

Prolog: Prof. Moh. Mahfud MD

Editor: Al Khanif, Mirza Satria Buana, Manunggal Kusuma Wardaya

Penyelarar Bahasa: Muhammad Bahrul Ulum

Perwajahan Sampul/Buku: Dwi Agusatya Wicaksana

Setting/Layout: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul

Jl Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration
(CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2017

Percetakan:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul

Jl Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

Daftar Isi

Pancasila dan Kedaulatan Bahasa dalam Pusaran Globalisasi → 301
Wiwit Kurniawan

Pancasila dalam Arus Liberalisasi Pangan Pascareformasi → 317
Muhammad Bahrul Ulum

Menguji Keadilan Pancasila dalam Menjaga Kedaulatan Rakyat
atas Tanah → 337
Hayatul Ismi

BAB V KEADILAN DAN DEMOKRASI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI → 355

Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia → 357
Rosita Indrayati

Purifikasi Pilkada dan Revitalisasi Demokrasi Pancasila di Indonesia → 371
M. Iwan Satriawan

Solusi Pancasila dalam Pembaharuan Demokrasi Indonesia: Kajian
Penyempurnaan Regulasi Pilkada → 387
Achmadudin Rajab

Menyoal Aktualisasi Pancasila dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi → 405
Sadhu Bagas Suratno

Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Perspektif Ketatanegaraan → 423
Cakra Arbas

PANCASILA DAN KEDAULATAN BAHASA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Wiwit Kurniawan

Latar Belakang: Globalisasi dan Politik Bahasa

Kita sekarang hidup di era di mana setiap orang di berbagai belahan dunia saling terhubung dan bisa berkomunikasi dengan mudah. Fenomena globalisasi telah merubah sendi-sendi kehidupan dalam berbagai masyarakat yang memiliki budaya yang beragam. Dengan adanya konektivitas yang masif, setiap budaya dan masyarakat tidak bisa hidup terisolasi, namun akan menjadi bagian dari jejaring masyarakat dunia.

Adanya globalisasi tentu bisa memberikan dampak positif, seperti peningkatan perdagangan internasional dan silang budaya. Namun di sisi lain, interaksi budaya dalam masyarakat global bisa membawa pada subordinasi, imperialisme dan kolonialisme bentuk baru. Globalisasi membawa kita pada dunia yang tanpa batas dan model komunitas plural, namun bagaimana pengetahuan disebarkan menunjukkan adanya diskursus tunggal dan tradisi intelektual dari komunitas yang lebih dominan.¹ Bentuk infiltrasi negatif dan dominasi tersebut terjadi di berbagai dimensi, termasuk ranah bahasa. Munculnya salah satu bahasa internasional yang dominan menurut Phillipson disebut Imperialisme bahasa. Imperialisme bahasa adalah dominasi suatu bahasa yang ditegaskan oleh konstruksi terus-menerus atas ketidakadilan (*inequality*) secara struktural maupun kultural antara bahasa yang dominan dengan bahasa lain.² Pancasila sebagai falsafah hidup

¹ Suresh A Canagarajah, ed., 2005. *Reclaiming the Local in Language Policy and Practice*, New York: Routledge, hal xiv.

² Robert Phillipson, 1992. *Linguistic Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 47.

bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai panduan dalam membendung hegemoni asing dalam arus globalisasi. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul atas dampak globalisasi di ranah bahasa, diperlukan nilai-nilai praktis sebagai panduan yang bersumber dari Pancasila dan kebudayaan bangsa.

Indonesia, sebagai negara di persimpangan benua, telah mengalami globalisasi sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam konteks perdagangan global, di Nusantara sejak lama telah ada jalur perdagangan antara Barat dan Timur³. Pada era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal nusantara telah berlayar mengarungi samudera untuk berdagang dan berdiplomasi ke negara-negara 'atas angin'. Pada sekarang ini, intensitas interaksi budaya tentu akan lebih intens. Oleh karena itu, dampak negatif dari globalisasi juga muncul di Indonesia.

Atas dampak globalisasi tersebut kebudayaan Indonesia senantiasa berinteraksi dengan kebudayaan-kebudayaan lain di dunia. Berbagai keunggulan budaya luar bisa memperkaya khasanah kebudayaan Nusantara. Di sisi lain globalisasi merupakan sebuah virus mematikan yang bisa berpengaruh buruk pada pudarnya eksistensi budaya-budaya lokal⁴. Sebagai contoh, masuknya budaya Barat melalui media membuat masyarakat mengikuti tren populer namun tanpa filter kritis dan diduplikasi secara serampangan. Alih-alih melakukan modernisasi dalam masyarakat, malah hanya melakukan pembaratan (*westernization*) saja. Meniru budaya Barat namun hanya permukaannya saja dan terkadang bertentangan dengan nilai budaya bangsa.

Di samping membawa heterogenitas budaya, globalisasi juga menyebabkan penyeragaman dalam segi bahasa. Globalisasi memungkinkan munculnya keberagaman budaya dalam sebuah komunitas tertentu. Setiap orang dari latar budaya dan bahasa yang berbeda bisa berinteraksi dengan masyarakat dari budaya yang berbeda. Heterogenitas tersebut memerlukan adanya syarat, yakni kesatuan bahasa. Walaupun menyajikan pertemuan berbagai budaya, globalisasi mendorong masyarakat dunia untuk

³ Syahrudin Mansyur, 2016. "Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah dalam Jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku," *Kapata Arkeologi*, 7, 13, hlm. 20.

⁴ A. Safril Mubah, 2011. "Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi," *Jurnal Unair*, 24, 4, hlm. 302.

menggunakan bahasa yang sama, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Dalam interaksi global ini bahasa Inggris menjadi penghubung. Oleh karena itu, banyak negara di dunia sangat menekankan penguasaan bahasa Inggris bagi warganya.

Di Indonesia, posisi bahasa Inggris baik dalam pendidikan maupun dalam masyarakat sangat penting. Dalam pendidikan di Indonesia, bahasa Inggris diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mata pelajaran bahasa Inggris juga dijadikan mata kuliah yang diujikan secara nasional di sekolah. Dalam masyarakat Indonesia, bahasa Inggris juga dianggap sebagai bahasa yang memiliki prestis tinggi. Di Indonesia, bahasa Inggris digunakan sebagai media bahasa perdagangan internasional dan bahasa akademik. Oleh karena itu, ada kesan orang yang menguasai bahasa Inggris adalah orang dari golongan yang terpelajar, modern dan pintar.⁵

Bahasa Inggris di Indonesia tidak sekedar menjadi bahasa asing (*foreign language*), namun merupakan suatu instrumen kolonialisme. Phillipson memandang globalisasi sebagai sebuah kesatuan rajutan antara *Americanization* dan *Englishization*⁶, usaha untuk menyebarkan dominasi bahasa Inggris. Sugiharto melihat bahwa ada efek dari globalisasi di mana negara yang kuat dianggap sebagai 'center' dan yang lemah sebagai 'periphery', negara yang dominan memaksakan kuasanya atas yang didominasi⁷. Dalam hal ini, yang dipermasalahkan adalah bukan penyebarannya yang masif, namun adanya wacana yang menggiring pemikiran untuk mengagung-agungkan (fetisme) bahasa Inggris. Konsekuensi tersebut berakibat munculnya 'keminderan' berbahasa. Ada rasa tidak percaya diri dengan bahasa sendiri dan cenderung memuja bahasa Inggris.

Bahasa Inggris sangat jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari di Indonesia, masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Walaupun demikian, hal ini tidak membuat bahasa Inggris absen dari pergaulan di Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya campur kode (*mix code*) antara bahasa Indonesia

⁵ Allan Lauder, 2010. "The status and function of English in Indonesia: A review of key factors," *Makara Hubs-Asia*, 8, 3, hlm. 6.

⁶ Setiono Sugiharto, 2013. "Rethinking Globalization, Reclaiming the Local: A Post-Colonial Perspective of English Language Education in Indonesia," *The Indonesian Quarterly*, 41, 3, hlm. 151.

⁷ *Ibid.*

dan bahasa Inggris. Jika digunakan sebagaimana mestinya, campur kode bisa menambah khasanah perbendaharaan kata, namun jika dilakukan serampangan akan menyebabkan kekacauan bahasa. Ariel Heryanto menyampaikan bahwa penggunaan istilah bahasa Inggris secara obral dan serampangan banyak muncul dalam pergaulan remaja di Indonesia dan film-film remaja, bahkan gejala ini dianggap normal.⁸ Penutur Indonesia menyerap istilah dalam kalimat asing namun tanpa mengindahkan makna dan gramatika. Akhirnya yang muncul adalah bahasa campur aduk, tidak bisa dikatakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak.

Dalam perspektif bangsa Indonesia, bahasa merupakan entitas sentral dalam sebuah identitas budaya. Sumarsono menyebutnya sebuah identitas diri yang konstruktif⁹. Hal ini terlihat dalam Sumpah Pemuda, ditegaskan bahwa yang satu tidak hanya bangsa dan tanah air, namun juga bahasa. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, namun memiliki fungsi kohesif sebagai pemersatu¹⁰, pembentuk suatu identitas bangsa. Bahasa merupakan sebuah entitas pembeda dan 'ruang' di mana budaya dan bangsa ada dan berkembang. Oleh karena itu, permasalahan fetisme bahasa asing dan campur-aduk bahasa menjadi hal yang penting. Persoalan ini tidak hanya tentang bahasa saja, namun merupakan persoalan identitas kebangsaan dan nasionalisme.

Dalam berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa.¹¹ Oleh karena itu, berbagai persoalan kebangsaan dan nasionalisme harus merujuk pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan pedoman dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak terkecuali pada permasalahan politik bahasa yang ada sekarang ini. Dalam menyelenggarakan masyarakat, aturan berbahasa juga harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai bintang pembimbing (*leading star*) harus digali dan dihayati agar bisa

⁸ Ariel Heryanto, Rubrik Asal-Usul, *Kompas Cyber Media*, 11 Maret 2007

⁹ Sumarsono, 2002, *Sosiolinguistik*, Yogyakarta: Sabda bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, hlm. 162.

¹⁰ Jujun S Suriasumantri, 1984, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 200.

¹¹ Rozali Abdullah, 1993, *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

merumuskan panduan nilai-nilai dalam menyusun kebijakan dan tindakan bahasa di Indonesia.

Pancasila merupakan pandangan hidup untuk setiap persoalan bangsa, termasuk persoalan bahasa. Oleh karena itu, perlu adanya kajian bagaimana nilai-nilai pancasila berbicara soal kebahasaan dan rumusan apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan imperialisme bentuk baru berupa hegemoni bahasa asing di Indonesia.

Dalam makalah ini penulis akan mengkaji bagaimana proses globalisasi dan dampaknya pada Indonesia, terutama dalam ranah bahasa. Dalam perspektif pemikiran Robert Phillipson, fenomena fetisme bahasa Inggris dan posisinya yang dominan dipandang sebagai suatu imperialisme bahasa. Penjabaran atas bagaimana fenomena globalisasi memperkuat imperialisme bahasa akan disajikan untuk memperjelas konteks yang tengah terjadi. Untuk memecahkan permasalahan terkait Imperialisme bahasa dalam pusaran globalisasi ini, penulis akan menggali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai *problem solver* dalam persoalan kebahasaan.

Globalisasi dan Dampaknya dalam Kebahasaan di Indonesia

Dalam bagian ini penulis akan menjabarkan hakikat globalisasi, baik segi sejarah maupun konsep. Bagian ini akan mengkaji bagaimana fenomena globalisasi tersebut berdampak pada kebutuhan untuk berbahasa Inggris dan bagaimana bahasa tersebut menjadi bahasa yang dominan dalam kancah global.

Istilah 'global' menurut Oxford English Dictionary telah muncul sejak 400 tahun yang lalu, namun penggunaannya secara umum mulai tahun 1960¹². Globalisasi menjadi wacana yang banyak dibahas oleh pemikir di berbagai disiplin keilmuan. Oleh karena itu, pendefinisian atas istilah globalisasi menjadi sulit. Di samping masalah etimologi, kapan fenomena globalisasi dimulai juga merupakan permasalahan yang pelik. Untuk lebih memahami fenomena tersebut, berikut ini akan dibahas sejarah globalisasi dan pengertiannya secara konseptual.

¹² Malcolm. Waters, 2001, *Globalization (2nd edn)*, London and New York: Routledge, hlm. 2.

Interaksi antar bangsa dalam catatan sejarah dimulai sejak awal munculnya peradaban besar. Walaupun sudah berlangsung sejak lama, interaksi yang cukup kuat dan terjalin lama dimulai saat ramainya jalur sutra, sebuah jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Cina. Janet Abu-Lughod menjelaskan bahwa "Perekonomian perdagangan internasional yang terbentang dari tenggara Eropa sampai Cina pada masa 1250 sampai 1350, telah mengubah Asia tengah menjadi 'media tanpa friksi' melalui perdagangan dan pertukaran yang lancar dan bebas."¹³ Pada era inilah berbagai suku bangsa dan kebudayaan saling berinteraksi secara masif dan teratur dalam rangka perdagangan.

Revolusi industri dan kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa juga merupakan faktor penting dalam mendorong globalisasi di era modern. Penemuan kapal uap dan penjelajahan atas benua baru merupakan jalan dimulainya interaksi global secara masif. Pada abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa membuat rintisan terpenting dalam penjelajahan samudera, salah satunya adalah pelayaran ke "Dunia Baru" oleh Columbus untuk mencari rempah-rempah¹⁴. Berbagai perkembangan teknologi, kebutuhan akan bahan baku dan surplus produksi memaksa bangsa Eropa untuk mencari daerah-daerah koloni sebagai sumber bahan baku dan daerah pemasaran mereka. Berbagai faktor tersebut memungkinkan terjadinya suatu interaksi global dengan sangat cepat.

Globalisasi pada awal zaman modern berbeda dengan globalisasi masa lalu lewat jalur sutra. Globalisasi modern didongkrak oleh kapitalisme dan kebutuhan akan sumber daya alam. Oleh karena itu, globalisasi saling berkelindan dengan invasi bangsa-bangsa Eropa. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Malcom Waters bahwa Globalisasi adalah konsekuensi langsung dari ekspansi kebudayaan Eropa yang membentang di seluruh planet melalui pemukiman, kolonialisasi, dan replika budaya. Globalisasi saling terikat dengan pola perkembangan kapitalisme sebagaimana hal tersebut menyebar melalui ranah politik dan budaya.¹⁵ Globalisasi dalam pengertian Waters tidak hanya suatu perdagangan yang *fair*, namun suatu

¹³ Kevin H. O'Rourke, dan Jeffrey G. Williamson, 2002, "When did globalisation begin?" *European Review of Economic History*, 6, 1, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 1

¹⁵ Malcom Waters, *supra* note 12, hlm. 6.

arena penundukan dan penjajahan. Melalui jalan globalisasi lah imperialisme beroperasi dan penundukan wilayah dan budaya lain dimulai.

Konsep Globalisasi

Karena istilah globalisasi digunakan oleh banyak pemikir dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, penyeragaman istilah globalisasi akan sangat sulit. Walaupun sulit membuat definisi yang bulat, dengan analisis sejarah di atas, akan didapat pengertian khusus akan globalisasi. Secara umum globalisasi dipandang sebagai fenomena yang memberi kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari masyarakat global. Seperti yang diutarakan oleh Waters bahwa "Komponen penting definisi adalah gagasan atas intensifikasi kesadaran global dimana ini adalah sebuah fenomena baru." Namun jika dilihat dari analisis sejarah yang disajikan di atas, globalisasi tidak sekedar interaksi dan komunikasi. Dalam globalisasi ini muncul pada kesadaran global, kesadaran yang menyokong adanya saling ketergantungan material yang sangat tinggi, kesadaran yang meningkatkan kemungkinan dunia akan diubah menjadi suatu sistem tunggal."¹⁶ Sehingga globalisasi bukan hanya tumbuhnya kesadaran akan kesatuan global, namun munculnya suatu sistem tunggal. Sistem inilah yang akan mengontrol lokalitas agar tunduk atas kuasa global.

Dalam makalah ini, globalisasi dipandang sebagai suatu fenomena di mana berbagai bangsa dan budaya saling berinteraksi, namun interaksi tersebut tidaklah dalam kedudukan yang setara. Globalisasi merupakan jalan untuk melakukan infiltrasi dan hegemoni oleh budaya yang dominan kepada budaya subordinat. Globalisasi adalah arena pertarungan antar budaya, budaya kuat melakukan hegemoni, budaya lokal melakukan resistensi.

Karena globalisasi merupakan arena pertarungan, hal ini akan berdampak pada lokalitas dan nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi, nasionalisme dan kedaulatan suatu bangsa diuji dan ditantang. Dalam konteks Indonesia, di era globalisasi, ketahanan nasional merupakan perisai untuk membendung pengaruh buruk dari berbagai ideologi dan budaya asing. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa akan berinteraksi dengan budaya dan ideologi asing. Di sinilah urgensi

¹⁶ Ibid. hlm. 205.

penghayatan nilai-nilai pancasila dalam berbagai ranah di mana arus global menggempur sendi kehidupan bangsa.

Nasionalisme Diserang Penjajahan Baru

Bahasa adalah instrumen penting dalam identitas nasional dan kebangsaan. Seperti kata pepatah bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Oleh karena itu, kebahasaan yang terbebas dari belenggu kolonial merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Dalam fenomena kebahasaan di Indonesia, di mana imperialisme baru yang menumpang globalisasi mengikis kedaulatan bahasa, perlu adanya kajian untuk mempertahankannya.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila adalah landasan dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan antitesis dari imperialisme dan kolonialisme yang terjadi selama 350 tahun di bumi nusantara. Karena posisi Pancasila sebagai filter ideologi luar dan penangkal kolonialisme, maka nilai-nilai luhur Pancasila perlu digali untuk menanggulangi fenomena penjajahan bahasa yang terjadi di Indonesia.

Kedudukan Pancasila dalam Masyarakat Indonesia

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kali Bung Karno menyampaikan pidato yang monumental tentang Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI, pada hari itulah lima prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila¹⁷. Pancasila lahir dari sebuah proses yang panjang dan melibatkan berbagai unsur dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Munculnya Pancasila merupakan suatu titik tolak dalam sejarah perjuangan bangsa. Pancasila dirumuskan untuk menjadi sebuah dasar negara, sebuah landasan bagi kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan. Pancasila merupakan sebuah penolakan atas imperialisme dan kolonialisme. Seperti yang diutarakan Hartati Soemasdi bahwa munculnya Pancasila dan negara adalah suatu sintesis dari pergulatan thesis-antithesis yang ada pada zamannya¹⁸. Pancasila merupakan sebuah rumusan untuk melawan segala bentuk kolonialisme.

¹⁷ Pimpinan MPR, 2012, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 41.

¹⁸ Hartati Soemasdi, 1985, *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 35.

Memang benar bahwa Soekarno adalah perumus Pancasila, namun beliau menolak untuk disebut sebagai pencipta Pancasila. Pancasila sudah ada sejak dahulu dalam jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang diutarakan Soekarno dalam pidatonya “Saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari, ialah sekedar memformuleerkan perasaan-perasaan yang ada dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata, yang saya namakan Pancasila¹⁹.” Sehingga, Pancasila adalah produk zaman, sebuah perjalanan panjang dan pengalaman yang dilalui bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya merupakan kristalisasi berbagai kepribadian luhur bangsa Indonesia di berbagai wilayah dan zamannya. Kalau kita menggali jiwa bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang, kita akan menemukan kelima unsur tersebut dalam jiwa bangsa Indonesia²⁰. Pancasila bukan merupakan barang baru, namun sebuah ikhtisar kepribadian semua kebudayaan nusantara. Nilai-nilai luhur pancasila telah dan tengah ada dalam tiap-tiap kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang menjelma dalam berbagai nilai, aturan, adat-istiadat, hikayat dan nasehat.

Implementasi Pancasila, Masih Relevankah?

Walaupun Pancasila merupakan sebuah manifesto luhur bangsa, namun dalam masa Orde Baru Pancasila diselewengkan. Pancasila ditafsirkan oleh penguasa sesuai dengan kebutuhannya dan dipaksakan ke dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pasca runtuhnya rezim Soeharto, Pancasila seakan menjadi trauma tersendiri dalam masyarakat.

Atas pengalaman tersebut, bukan berarti Pancasila harus terkubur bersama kalamnya masa lalu. Namun harus dihidupkan kembali sebagai jatidiri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Tafsir dan makna Pancasila tidak boleh dimonopoli oleh segelintir elit penguasa. Pancasila adalah milik sejarah dan rakyat Indonesia sepenuhnya. Di sanalah, di jiwa merekalah Pancasila bersemayam. Bukan pada politikus, dewan perumus, atau akademikus.

¹⁹ Pimpinan MPR, *supra* note 17, hlm. 42.

²⁰ Rozali Abdullah, *supra* note 11, hlm. 5.

Untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai dasar dan penuntun kepribadian bangsa, Pancasila perlu di-dekonstruksi. Revitalisasi Pancasila adalah dengan melepaskannya dari segala belenggu penafsiran tunggal, menyerahkannya pada asalnya, dalam jiwa rakyat Indonesia. Seperti yang diutarakan oleh Soekarno bahwa "Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu ada lima perasaan²¹." Maka untuk melakukan penghayatan akan Pancasila bukan dengan meletakkannya sebagai postulat dan melakukan deduksi yang menghasilkan nilai praktis dari postulat tersebut, namun dengan menggali, mencari dan menghayati dalam kebudayaan, jiwa masyarakat dan konteks bangsa Indonesia nilai-nilai luhurnya, lalu merefleksikannya ke dalam setiap sila di Pancasila.

Penghayatan Pancasila juga perlu mempertimbangkan setiap sila yang ada. Hal ini karena Pancasila merupakan sebuah keutuhan, setiap silanya saling mengunci. Seperti yang dikatakan Soemasdi bahwa ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat²². Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri, namun Ke-Tuhanan yang dimaksud terlingkupi oleh Kemanusiaan. Pemahaman menyeluruh atas setiap sila dan penghayatan dari bawah/ konteks masyarakat adalah kunci dalam menghidupkan kembali Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dalam pengamalannya, Pancasila perlu ditransformasi menjadi tujuan hidup, tinjauan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, dasar sikap hidup²³.

Pancasila sebagai pegangan hidup merupakan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Di samping itu, Pancasila merupakan sintesis dari dialektika perjuangan dan penjajahan. Oleh karena itu, dalam permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yakni terkait imperialisme dan kolonialisme bahasa, Pancasila merupakan solusi yang tepat. Sebagai sebuah solusi, Pancasila perlu ditransformasi ke dalam nilai praktis sebagai panduan dalam menyelesaikan persoalan kedaulatan bahasa yang tengah kita hadapi.

Dalam pengamalan Pancasila, perlu tekad yang bulat atau Ekaprasetya Pancakarsa. Ekaprasetya Pancakarsa berarti tekad yang bulat untuk

²¹ Pimpinan MPR, *supra* note 17, hlm. 42.

²² Hartati Soemasdi, *supra* note 18, hlm. 35.

²³ *Ibid.* hlm. 44.

melaksanakan lima kehendak.²⁴ Tekad diperlukan untuk selalu berpegang pada jiwa dan kepribadian bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Penghayatan Sila-sila Pancasila dalam Ranah Kedaulatan Bahasa

Pancasila harus dikemukakan isi dan artinya yang kontekstual sehingga nilainya bisa ditemukan dalam semua kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila masing-masing silanya adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam bagian ini penulis akan mencoba menggali dan menghayati berbagai nilai-nilai dalam kebudayaan bangsa dan mengawalinya dari persoalan secara kontekstual di masyarakat, setelah itu akan direfleksikan ke dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam real kondisi masyarakat akan digali sebagai suatu *problem solving* dalam menghadapi tantangan globalisasi dan imperialisme bahasa yang tengah dialami.

Untuk menghadapi fenomena imperialisme bahasa, penulis akan menganalisa setiap sila dalam pancasila yang nanti akan dijadikan nilai rujukan dalam permasalahan kebahasaan kita. Sila yang paling utama sebagai rujukan adalah sila ke-3 dan ke-5, yakni Persatuan Indonesia dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-3 merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini relevan untuk acuan dalam kebahasaan di mana salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Sila Keadilan sosial mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat adil dalam segala hal. Prinsip keadilan bisa digunakan sebagai landasan untuk bisa menempatkan segala sesuatu sebagaimana fungsi dan tempatnya. Seperti dalam hal kebahasaan, di mana perlu meletakkan dan menggunakan bahasa asing dan bahasa nasional sesuai fungsi dan kedudukannya. Dari analisa Pancasila ini lah akan diperoleh landasan etika dalam menghadapi persoalan imperialisme bahasa.

Karena Pancasila merupakan sistem filsafat yang integral, maka setiap sila akan terpaut dengan sila yang lain. Dalam pembahasan ini penulis

²⁴ Ibid. hlm. 64.

lebih menekankan sila ke-3 dan sila ke-5, namun akan tetap mengkorelasikan dengan sila-sila yang lain. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan Pancasila bisa menjadi sumber nilai bagi tantangan imperialisme bahasa dalam era globalisasi.

Bahasa Sebagai Pemersatu Bangsa

Benedict Anderson mengatakan bahwa *human language created possibility of a new form of imagined community*.²⁵ Hal ini menyimpulkan bahwa bahasa adalah unsur pemersatu dan pembentuk suatu bangsa. Oleh karena itu, kedaulatan bahasa adalah faktor penting dalam usaha menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Seperti dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia sepakat untuk bersatu dengan tujuan melindungi hak setiap rakyatnya dari segala bentuk penindasan.

Seperti kata pepatah “bahasa menunjukkan bangsa”. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa nasionalnya, karena bahasa Indonesia telah mempersatukan ribuan pulau yang ada di nusantara. Ketidakpercayaan diri dalam menggunakan bahasa nasional merupakan ancaman bagi persatuan. Kebanggaan berbahasa Indonesia bukan berarti pemaksaan penggunaannya dalam setiap percakapan dan kehidupan sehari-hari. Namun lebih pada saat penggunaan sesuai fungsinya dan dengan diiringi rasa bangga.

Memposisikan secara biner bahasa nasional dan bahasa Inggris dan meletakkan bahasa Inggris di posisi yang lebih prestisius merupakan tanda kurangnya penghayatan akan nilai persatuan bangsa. Hal ini bukan berarti anti atau melarang apa yang serba asing, namun penghapusan mental terjajah atau mental *inlander*. Mental yang merasa rendah diri akan identitasnya, mental yang selalu silau dan takluk dengan tuan dan nyonya kompeni.

Sebagai alat pemersatu bangsa, kedudukan bahasa Indonesia tidak bisa digantikan oleh bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Pancasila dalam

²⁵ Benedict Anderson, 2006, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso Books, hlm. 59.

sila ke-3 menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa persatuan tersebut, kedaulatan dan kestabilan negara akan sulit diraih. Karena bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu sangat penting, maka tindakan fetisme bahasa Inggris dan memposisikan bahasa tersebut sebagai bahasa yang utama merupakan hal yang keliru.

Keadilan dalam Berbahasa

Pada Sila ke lima berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Secara umum, sila ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial dan budaya²⁶. Keadilan adalah bersedia memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya²⁷. Keadilan ini juga perlu diimplementasikan pada penutur bahasa dan ranah kebahasaan.

Dalam masyarakat modern, meminjam istilah dari Phillipson, *right of language* atau hak berbahasa merupakan hak yang harus diakui dalam masyarakat demokrasi. Setiap orang berhak menggunakan bahasa aslinya tanpa intimidasi dan *stereo typing*. Bahasa adalah setara, konstitusi dan Pancasila tidak mengizinkan suatu bentuk bahasa digunakan untuk merendahkan atau mempertinggi kedudukan seseorang.

Dalam masa kolonial, hak-hak kemanusiaan dan kesetaraan hanya diberikan kepada golongan orang Belanda dan kalangan ningrat. Setiap bangsa juga dikotakkan dengan hanya boleh menggunakan bahasanya sendiri. Bahasa Belanda diposisikan sebagai bahasa Tinggi yang boleh digunakan oleh kalangan atas. Pancasila yang mengandung nilai keadilan merupakan antithesis dari ketimpangan ini. Keadilan sosial masyarakat akan hak kesetaraan dan kemanusiaan harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia.

Tidak ada bahasa yang lebih tinggi derajatnya dari bahasa lain. Yang menentukan tinggi rendahnya seseorang bukan jenis bahasanya namun apa yang dibahasakan. Keadilan sosial dalam hal bahasa adalah menjunjung tinggi kedaulatan bahasa persatuan, memberikan hak yang sama bagi setiap warga untuk berbahasa.

²⁶ Pimpinan MPR, *supra* note 17, hlm. 80.

²⁷ Hartati Soemasdi, *supra* note 18, hlm. 47.

Sila Keadilan sosial juga terpaut dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena keadilan akan saling beriringan dengan kemanusiaan dan keberadaban. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengantarkan kita akan sejarah kebudayaan nusantara yang beradab dan berkeadilan. Dalam konteks penjajahan bahasa, kita bisa mengambil hikmah bahwa tiap-tiap kebudayaan nusantara tidak pernah memaksakan suatu suku atau bangsa untuk menggunakan bahasa tertentu. Bahasa adalah ciri dan identitas kebangsaan. Oleh karena itu, kita harus menghargai seseorang atas pilihan bahasanya. Kita harus meletakkan bahasa asing/ Inggris sebagai mana mestinya. Bahasa asing sebagai sarana untuk berkomunikasi pada yang asing. Bukan untuk dipaksakan dalam kehidupan internal negara yang berdaulat. Hal ini juga tidak berarti melarang penggunaan bahasa Inggris, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan fungsi dan kedudukannya.

Penutup

Sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting. Dalam arus globalisasi yang membawa imperialisme dan kolonialisme bentuk baru dalam ranah bahasa, membuat kedaulatan bahasa di Indonesia menjadi goyah. Untuk meneguhkan kembali kedudukan bahasa Indonesia sebagai suatu kebanggaan dan identitas nasional, perlu adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perisai bangsa dalam menghadapi penetrasi negatif dari globalisasi. Dalam penghayatannya, Pancasila menyuguhkan suatu kesadaran bahwa dalam berbahasa hendaknya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, persamaan hak dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan sebuah antitesis atas bentuk penjajahan bahasa yang membentuk hirarki yang timpang antara bahasa nasional dan bahasa asing. Prinsip yang bersumber dari Pancasila tersebut merupakan penawar atas problematika kebahasaan. Dengan kesetaraan dalam memandang bahasa asing dan kebanggaan atas bahasa nasional, bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat sekaligus memiliki daya saing global.

Referensi

- Abdullah, Rozali, *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Anderson, Benedict, *Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso Books, 2006.
- Ariel Heryanto, Rubrik Asal-Usul, *Kompas Cyber Media*, 11 Maret 2007.
- Canagarajah, A. Suresh, ed., *Reclaiming the Local in Language Policy and Practice*, New York: Routledge, 2005.
- Lauder, Allan, "The status and function of English in Indonesia: A review of key factors", *Makara Hubs-Asia*, volume 8, nomer 3, 2010.
- Mansyur, Syahrudin, "Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah dalam Jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku", *Kapita Arkeologi*, volume 7, nomer 13, 2016.
- Mubah, A. Safril, "Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi", *Jurnal Unair*, volume 24, nomer 4, 2011.
- O'Rourke, Kevin H., Jeffrey G., Williamson, "When Did Globalisation Begin?", *European Review of Economic History*, volume 6, nomer 1, 2002.
- Phillipson, Robert, *Linguistic Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Pimpinan MPR, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Said, Edward, *Orientalism*, New York: Penguin Books, 1978.
- Soemasdi, Hartati, *Pemikiran tentang filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Sugiharto, Setiono, "Rethinking Globalization, Reclaiming the Local: A Post-Colonial Perspective of English Language Education in Indonesia", *The Indonesian Quarterly*, volume 41, nomer 3, 2013.
- Sumarsono, *Sosiolinguistik*, Yogyakarta: Sabda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Waters, Malcolm, *Globalization (2nd ed)*, New York: Routledge, 2001.